

## OPTIMALISASI PROGRAM NOL JAMBAN DI BANTARAN SUNGAI ARUT KECAMATAN ARUT SELATAN

*Akhmad Fauzian Noor<sup>1</sup>, Ulul Hidayah<sup>2\*</sup>*

*Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangkaraya, Palangkaraya, Indonesia<sup>1</sup>*

*Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia<sup>2</sup>*

e-mail: [ulul-hidayah@ecampus.ut.ac.id](mailto:ulul-hidayah@ecampus.ut.ac.id)

### ABSTRACT

The Arut River is a river that flows in South Arut District, West Kotawaringin Regency, Central Kalimantan. Communities along the Arut River use the river for transportation and fishing; the community also uses the Arut River as latrines. The habitual behaviour of the open defecation community on the banks of the Arut River is of concern to the local government. Based on the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 03 of 2014 concerning STBM on the first pillar, namely STOP BABS, the West Kotawaringin Regency Government is promoting the Zero Latrine Movement Program. This program aims to stop the spread of diseases from open defecation and provide essential services to the community. This study aimed to formulate a strategy for optimizing the Zero Latrine Movement Program with a Community Participatory Approach in the Arut Riverbanks, South Arut District. The method used in this research is descriptive qualitative research, supported by primary data and secondary data. Primary data were collected through observation and interviews, and secondary data were in the form of an inventory of PUPR Office data for Kotawaringin Barat Regency. The study results found that the factors hindering the Optimization of the Zero Latrine Movement Program were the Budget/Funds, Infrastructure and Human Resources factors. The strategy that the government can implement to optimize the zero-latrine program is to continue to approach and socialize, involve the private sector and local companies, and participate in the community.

**Keywords:** Toilet, Optimization, Community Participation, Sanitation

### ABSTRAK

Sungai Arut adalah sungai yang mengalir di Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Masyarakat bantaran Sungai Arut menggunakan sungai sebagai sarana transportasi dan mencari ikan, namun sungai tersebut juga digunakan masyarakat sebagai jamban. Perilaku kebiasaan masyarakat BABS di bantaran Sungai Arut menjadi perhatian pemerintah setempat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014 tentang STBM pada pilar pertama yaitu STOP BABS maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menggalakan Program Gerakan Nol Jamban. Program ini bertujuan untuk memutus penyebaran penyakit yang diakibatkan dari perilaku BABS dan untuk memenuhi layanan dasar kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi Optimalisasi Program Gerakan Nol Jamban di Bantaran Sungai Arut Kecamatan Arut Selatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang didukung berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara, data sekunder berupa Inventarisasi data Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Barat. Hasil penelitian di dapati faktor-faktor yang menghambat Optimalisasi Program Gerakan Nol Jamban yaitu faktor anggaran/ dana, sarana prasarana dan sumber daya manusia. Strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam optimalisasi program nol jamban yaitu terus melakukan pendekatan dan sosialisasi, melibatkan pihak swasta dan perusahaan setempat serta adanya partisipasi masyarakat.

**Kata kunci:** Jamban, Optimalisasi, Partisipasi Masyarakat, Sanitasi

## Pendahuluan

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah program pelibatan masyarakat untuk meninggalkan kebiasaan BABS (Buang Air Besar Sembarangan) dengan mempertimbangkan resiko kesehatan (Davik, 2016). Stop BABS adalah kondisi setiap individu yang tidak lagi melakukan perilaku BABS yang berpotensi dalam penyebaran penyakit (Permenkes RI (03/2014). Stop BABS merupakan langkah pertama dalam reformasi sanitasi menyeluruh yang bertujuan untuk menghentikan penyebaran penyakit dari kotoran manusia melalui air minum, makanan, dan area lainnya (Rahmiati et al., 2023). Penyelenggaraan STBM secara mandiri terdiri dari beberapa program diantaranya membiasakan cuci tangan pakai sabun, menerapkan perilaku Stop BABS, melakukan pengamanan sampah dan limbah cair yang dihasilkan rumah tangga, serta melakukan pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Program STBM dianggap penting karena dapat mengubah perilaku dan mampu meningkatkan kesehatan serta dapat mencegah penyebaran penyakit salah satunya pencegahan *stunting* (Rahmuniyati et al., 2021).

Sanitasi dasar (jamban) adalah pelayanan dasar kepada masyarakat yang belum mendapat perhatian yang serius dan belum menjadi yang utama sebagai prioritas dalam menanggulangi perilaku masyarakat yang masih BABS. Hal ini berdampak pada buruknya kualitas kesehatan masyarakat, tercemarnya air, tanah yang menyebabkan munculnya penyakit pada balita dan berpengaruh pada daya saing maupun citra daerah itu sendiri sehingga berdampak pada perekonomian di tingkat daerah (Zia et al., 2019). STBM dan penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014 yang bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia. Selaras dengan Peraturan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menggalakan Program Gerakan Nol Jamban di Bantaran Sungai Arut, Kecamatan Arut Selatan. Program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2020 hingga saat ini.

Program Nol Jamban di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilaksanakan di Bantaran Sungai Arut merupakan kegiatan penyelenggaraan sarana dan prasarana pendukung pembuangan limbah tinja yang memenuhi persyaratan standar sanitasi layak dan aman. Sarana pembuangan tinja yang tidak layak akan memicu masalah penyakit di lingkungan pemukiman sehingga perlu menjadi prioritas khusus (Noor et al., 2021). Pelaksanaan program berupa pembongkaran jamban di bantaran Sungai Arut dan menggantinya dengan membangun sarana prasarana tanki septik komunal dan tanki septik individual. Program Program Gerakan Nol Jamban di Bantaran Sungai Arut Kecamatan Arut Selatan ini bertujuan guna memutus penyebaran penyakit yang diakibatkan dari perilaku BABS dan untuk memenuhi sarana prasarana pembuangan limbah tinja yang layak dan aman untuk masyarakat. Selain itu program ini juga sebagai pemicu partisipasi masyarakat dalam

mengurangi kebiasaan BABS di bantaran Sungai Arut sekaligus merupakan langkah yang tepat bagi masyarakat agar dapat menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Data dibawah ini menunjukkan kondisi eksisting jumlah jamban terapung yang berada di lima kelurahan di sepanjang bantaran Sungai Arut Kecamatan Arut Selatan. Menjadi fokus pemerintah melalui Program Gerakan Nol Jamban di Bantaran Sungai Arut Kecamatan Arut Selatan dilakukan penyelenggaraan pembongkaran jamban sebagai upaya mengurangi kebiasaan BABS di bantaran sungai. Adapun jumlah keseluruhan jamban di lima kelurahan tersebut yaitu 220 buah jamban. Jamban yang sudah dilakukan pembongkaran sejumlah 65 buah jamban dan yang belum dilakukan pembongkaran sejumlah 155 buah jamban. Jamban-jamban yang belum dibongkar ini masih tersebar di lima kelurahan di sepanjang bantaran Sungai Arut Kecamatan Arut Selatan.

**Tabel 1. Data Jumlah Jamban Terapung di Lima Kelurahan Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat**

No	Lokasi	Jumlah Jamban Terapung (Buah)	Pembongkaran	
			Sudah	Belum
1	Kelurahan Mendawai	51	8	43
2	Kelurahan Raja	35	3	32
3	Kelurahan Mendawai Seberang	38	27	11
4	Kelurahan Raja Seberang	56	25	31
5	Kelurahan Baru	40	2	38
<b>Total</b>		<b>220</b>	<b>65</b>	<b>155</b>

Sumber: Data Instrumen SSK Pemutakhiran DPUPR, 2022.

Saat ini ada sekitar 155 buah dari 220 buah jamban yang belum dibongkar yang berada di lima kelurahan di sepanjang bantaran Sungai Arut, Kecamatan Arut Selatan. Hampir seluruh masyarakat pengguna jamban di bantaran Sungai Arut adalah masyarakat di lima kelurahan yang belum memiliki jamban, ada yang memiliki jamban tapi belum memenuhi persyaratan jamban yang layak dan aman. Hingga saat ini masih tercatat adanya penduduk yang masih BABS dan belum terlayani cakupan air limbah. Dari lima kelurahan yang berada disepanjang Sungai Arut, Kelurahan Mendawai merupakan kelurahan yang paling mendominasi perilaku BABS dengan jumlah sebanyak 708 rumah tangga. Sementara itu perilaku BABS di Kelurahan Raja Seberang sebanyak 204 rumah tangga, Kelurahan Baru sebanyak 72 rumah tangga, Kelurahan Mendawai Seberang sebanyak 50 rumah tangga, dan Kelurahan Raja sebanyak 40 Rumah Tangga.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa Program Gerakan Nol Jamban di Bantaran Sungai Arut Kecamatan arut Selatan belum optimal. Hal ini terlihat dari perilaku masyarakat yang BABS menggunakan jamban dibantaran Sungai Arut yang masih cukup banyak. Oleh karenanya perlu dilakukan penelitian untuk membantu merumuskan strategi pemerintah dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat otimalisasi Program Gerakan Nol Jamban sehingga dapat dirumuskan strategi Optimalisasi Program Gerakan Nol Jamban di

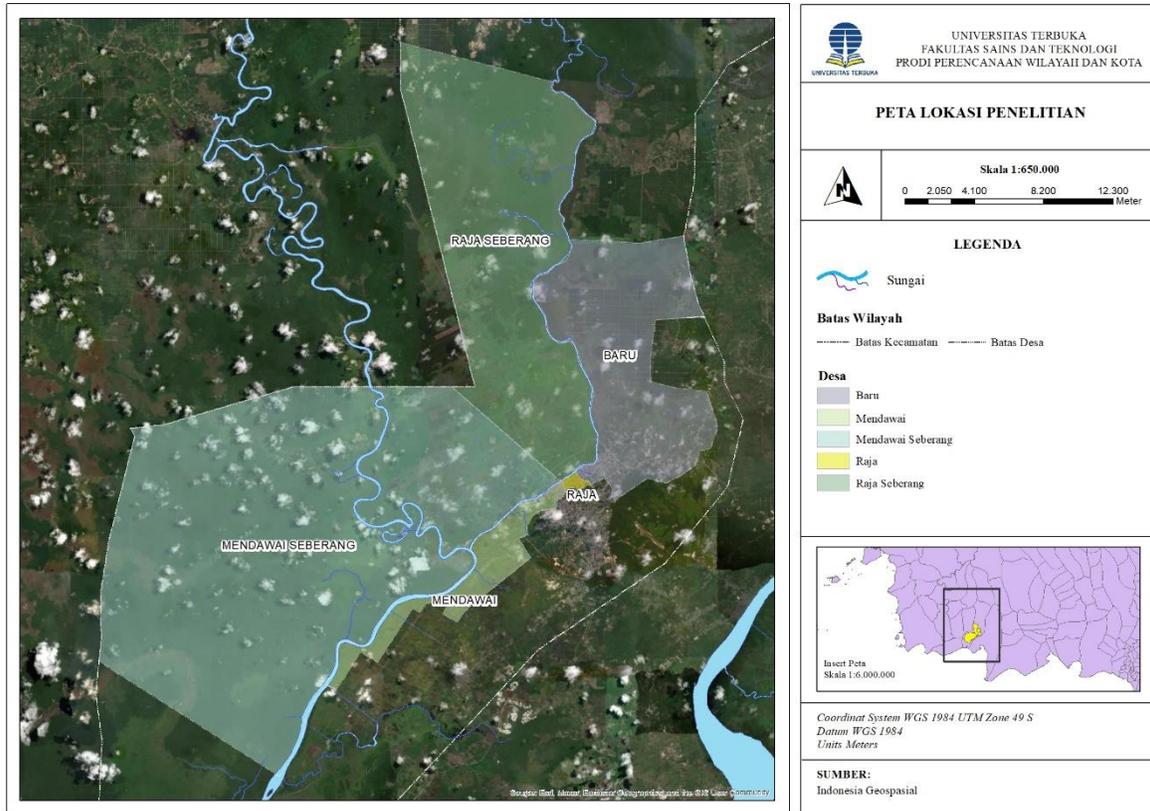
Bantaran Sungai Arut, Kecamatan Arut Selatan. Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan guna mempercepat layanan terhadap masyarakat di sektor sanitasi untuk memberikan layanan dasar minimal kepada masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Penerapan Program Gerakan Nol Jambang di Kabupaten Kotawaringin Barat berada di sepanjang bantaran Sungai Arut di Kecamatan Arut Selatan tepatnya di lima Kelurahan yaitu Kelurahan Raja, Kelurahan Raja Seberang, Kelurahan Baru, Kelurahan Mendawai dan Kelurahan Mendawai Seberang. Sungai Arut adalah sungai yang mengalir di Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat yang memiliki panjang 250 km dengan lebar kurang lebih 100 meter. Hulu Sungai Arut berasal dari Desa Panahan Kecamatan Arut Utara dan bermuara di Sungai Lamandau Kecamatan Arut Selatan. Kehidupan masyarakat bantaran sungai tidak lepas dari keberadaan Sungai Arut yang menjadi jalur transportasi dan sebagai penopang ekonomi masyarakat. Selain bermukim di daratan masyarakat juga membangun rumah lanting dibantaran Sungai Arut, masyarakat bantaran Sungai Arut menggantungkan hidup dari Sungai Arut, mulai dari menggunakan sungai sebagai jalur transportasi, sungai sebagai sarana mencari ikan juga menggunakan sungai sebagai jamban mereka. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan April-Juli tahun 2023.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian berupa data primer dan data sekunder. Teknik pencarian data primer melalui observasi dan wawancara terhadap pemerintah setempat bersama stakeholder inti di dua kelurahan yang masyarakatnya masih banyak melakukan perilaku BABS yaitu Kelurahan Mendawai dan Kelurahan Raja Seberang. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 22 orang yang terdiri dari, pemerintah setempat dan stakeholder inti. Sedangkan data sekunder yang di dapat berupa data inventarisasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu data cakupan layanan air limbah Tahun 2022, data jumlah jamban, data jumlah jamban yang sudah dibongkar dan data jumlah jamban yang belum dibongkar dan data pemutakhiran DPUPR (2022). Berdasarkan jenis data tersebut, maka yang menjadi sumber dalam penelitian ini dapat berupa orang, dokumen, kegiatan dan tempat.

**Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian**



Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yang mana penelitian ini lebih menggambarkan pada keadaan yang sebenarnya tanpa ada rekayasa pada obyek penelitian. Proses memperoleh data dalam penelitian ini pun bersifat apa adanya agar dapat menyampaikan peristiwa dan keadaan yang terjadi di lapangan secara fakta dan obyektif serta dapat memecahkan masalah yang ada pada Optimalisasi Program Gerakan Nol Jamban dengan Partisipasi Masyarakat di Bantaran Sungai Arut di Kecamatan Arut Selatan.

## Hasil dan Pembahasan

### Faktor Penghambat Optimalisasi Program Gerakan Nol Jamban di Bantaran Sungai Arut Kecamatan Arut Selatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan mengambil sampel mulai dari pemerintah setempat, ketua RT dan tokoh masyarakat di dapati beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi Optimalisasi Program Gerakan Nol Jamban di Bantaran Sungai Arut. Adapun faktor penghambat program tersebut adalah faktor anggaran, infrastruktur dan SDM. Minimnya anggaran, sarana, kualitas sumber daya manusia, pemantauan dan evaluasi, serta kurangnya kolaborasi lintas sektor menjadi hambatan

program Stop BABS (Ruba et al., 2021). Sedangkan menurut Zakiyya et al., (2017) menjelaskan bahwa faktor penghambat dalam penelitian Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat meliputi faktor usia, lama tinggal, jenis kelamin, kebiasaan, tingkat pendidikan, pola pikir, kemauan, jenis pekerjaan, kesempatan, kebijakan dan jarak. Kesebelas program ini yang menjadi penghambat terlaksananya program tersebut yang membuat masyarakat tetap melakukan perilaku BABS. Sedangkan (Syarifuddin et al., 2017) berpendapat untuk keberhasilan program sanitasi harus meliputi 3 upaya yang saling terkait yaitu peningkatan kebutuhan sanitasi, perwujudan lingkungan yang kondusif, dan penyiapan akses sanitasi.

### **Faktor Anggaran / Dana**

Program optimalisasi gerakan nol jamban ini sudah dilaksanakan sejak awal tahun 2020 tetapi sampai sekarang masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan jamban yang layak dan sehat. Keterbatasan anggaran pemerintah dalam layanan dasar pengadaan tangki septik komunal maupun tangki septik individual untuk masyarakat menjadi hambatan dalam optimalisasi Program Nol Jamban. Pembangunan tangki septik komunal dan pengadaan tangki septik individual dimaksudkan untuk memfasilitasi jamban masyarakat yang dibongkar di bantaran Sungai Arut kemudian diganti dengan jamban yang lebih layak dan aman. Meskipun pendekatan terus dilakukan tetapi jika dana untuk pembangunan dan pengadaan jamban sehat tidak ada maka masyarakat akan terus melakukan BABS, hal inilah yang kemudian menyebabkan ketidaktercapainya target sanitasi jamban sehat (Davik, 2016). Tidak adanya anggaran dalam pemeliharaan dan pengawasan sarana prasarana pada Program Sanitasi oleh Masyarakat (SANIMAS) yang telah dibangun dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan program (Surotinojo, 2009).

### **Sarana Prasarana**

Ketidakpemilikan sarana prasarana jamban yang layak dan sehat di masyarakat membuat masyarakat terus melakukan BABS di bantaran sungai, hingga tahun 2022 masyarakat yang melakukan BABS masih sebanyak 5,42% atau 3,574 rumah tangga. Tidak adanya sarana prasarana jamban dirumah mereka tidak lepas dari faktor ekonomi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Bantuan tangki septik komunal dan tangki septik individual yang diberikan pemerintah belum seluruhnya mencakup ke lapisan masyarakat. Sarana prasarana bantuan tangki septik individual yang diberikan pemerintah bersifat stimulan yang hanya memberikan tangki septik, kloset serta untuk pemasangannya saja sedangkan untuk bilik jamban dibuat oleh warga itu sendiri. Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah hal ini menjadi kendala bagi mereka, pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas bagi mereka.

Masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak akan mau jambannya dibongkar jika hanya diganti dengan tangki septik, kloset dan pemasangannya saja tanpa ada bilik jambannya. Jika menerimapun jamban mereka tidak akan di fungsikan karena sarana dan prasarana

yang mereka terima tidak lengkap / tanpa bilik. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat masih akan terus melakukan BABS di bantaran Sungai Arut. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah lebih banyak terkena dampak tidak mempunyai toilet daripada kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi (Widyastutik, 2017). Menurut Masnarivan et al., (2020) pendidikan, pengetahuan dan status ekonomi menjadi penyebab kurangnya sarana dan prasarana jamban sehat di masyarakat.

### Sumber Daya Manusia

Di samping faktor sarana prasarana yang belum memadai dan belum mencakup seluruh lapisan masyarakat sumber daya manusia yang rendah dan masih minimnya kesadaran masyarakat akan hidup bersih dan sehat dengan masih membuang tinja di jamban di bantaran Sungai Arut menjadi salah satu penyebab terhambatnya Program Gerakan Nol Jamban. Partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam mendukung program tersebut. Dinas PUPR sebagai penyelenggara maupun *stakeholder* setempat telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun kesadaran masyarakat dalam pemahaman pola hidup bersih dan sehat belum dapat dipahami dengan cukup baik, sehingga membuat warga masih melakukan BABS di jamban dengan alasan sudah menjadi kebiasaan dan merasa lebih puas. Pendidikan merupakan dukungan terhadap pentingnya penggunaan jamban yang baik dan sehat. Ini akan menjadi proses perubahan sikap, kepribadian dan tanggung jawab, sehingga menghasilkan cara hidup dan budaya yang sehat, baik dan benar tanpa paksaan dari manapun (Dunggio, 2012).

**Tabel 2. Data Cakupan Pelayan Air Limbah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022**

CAKUPAN PELAYAN AIR LIMBAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022					
Jumlah Rumah Tangga (KK):		65.947			
No	Sistem	Satuan	Jumlah	Rumah Tangga Terlayani (KK)	% Cakupan Layanan
<b>Perkotaan</b>					
Tanpa Akses					
1	BABs	KK	1.064	1.064	1,61%
2	Cubluk/Tangki Septik Individual Belum Aman	unit	1.167	1.167	1,77%
Akses Layak					
1	SPALD Setempat				
-	Skala Individual	unit	38.772	38.772	58,79%
-	Skala Komunal	unit	856	856	1,30%
2	SPALD Terpusat				
-	SPALDT Permukiman Berbasis Masyarakat	unit	16	857	1,30%
-	Berbasis Masyarakat	unit	-	-	0%
-	Berbasis Institusi	unit	-	-	0%
-	SPALDT Perkotaan	unit	-	-	0%
-	SPALDT Kawasan Tertentu	unit	-	-	0%

**CAKUPAN PELAYAN AIR LIMBAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
TAHUN 2022**

**Jumlah Rumah Tangga (KK):**

**65.947**

No	Sistem	Satuan	Jumlah	Rumah Tangga Terlayani (KK)	% Cakupan Layanan
<b>Pedesaan</b>					
Tanpa Akses					
1	BABs	KK	1.343	1.343	2,04%
Akses Dasar					
1	Cubluk/Tangki Septik Individual Belum Aman	unit	2.348	2.348	3,56%
Akses Layak					
1	SPALD Setempat				
-	Skala Individual	unit	17.920	17.920	27,17%
-	Skala Komunal	unit	1.584	1.584	2,40%
2	SPALD Terpusat				
-	SPALDT Permukiman Berbasis Masyarakat	unit	1	36	0,05%
-	Berbasis Institusi	unit	-	-	0%
-	SPALDT Perkotaan	unit	-	-	0%
-	SPALDT Kawasan Tertentu	unit	-	-	0%
				<b>BABS</b>	<b>5,42%</b>
				<b>Akses Dasar Pedesaan</b>	<b>3,56%</b>
				<b>Akses Layak</b>	<b>91,02%</b>
				<b>Total Akses Layak</b>	<b>94,58%</b>

Sumber: Dinas PUPR Kota Palangkaraya, 2022

Dari tabel 1 di atas terlihat cakupan layanan akses air limbah di Kabupaten Kotawaringin Barat hingga tahun 2022 telah mencapai 94,58 % atau 62,273 Rumah Tangga. Dimana akses layak sebesar 91,02 % dan akses dasar pedesaan sebesar 3,56%, jadi masih ada masyarakat yang melakukan BABS sebesar 5,42% atau 3,574 Rumah Tangga.

### **Strategi Pemerintah dalam Optimalisasi Program Nol Jamban**

Sebagai tindak lanjut dari temuan di atas, strategi-strategi optimalisasi program harus dilakukan pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas PUPR sebagai penyelenggara, Pemerintah Kelurahan serta *stakeholder* inti dapat terus berupaya dalam melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya-upaya ini sangat dibutuhkan dalam mengubah pola pikir masyarakat serta memberi peluang akan peran serta masyarakat, sehingga tercapai kesadaran akan pentingnya hidup bersih dan sehat. Bentuk dari keterlibatan *stakeholder* dalam pelaksanaan program dapat berupa dana, tenaga dan pikiran/ide, ketiganya saling berkaitan untuk keberhasilan suatu program (Sari, 2019). Terdapat dua faktor yang menjadi pemicu manajemen program nol jamban menjadi sangat baik, adalah faktor internal keterlibatan, tokoh masyarakat dan SDM yang baik. Sedangkan faktor eksternal, adanya keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menjadi penghubung dengan pihak luar. Penerapan dua faktor tersebut akan mendorong

keberhasilan pembangunan sarana sanitasi berbasis masyarakat dengan mandiri (Indrayati, 2012). Adapun strategi dalam optimalisas program nol jamban dapat dilakukan dengan:

1. Pendekatan / Sosialisasi

Pendekatan-pendekatan serta sosialisai kepada masyarakat terus dilakukan, peran Pemerintah setempat dan *stakholder* inti sangat membantu dalam merubah pola pikir masyarakat di sektor kesehatan. Adapun pendekatan teknis yang diperlukan oleh pemerintah dalam kegiatan sosialisasi ini adalah dengan sosialisasi secara komunal dan personal. Sosialisasi dilakukan secara komunal dengan mengundang masyarakat setempat untuk duduk dan berdiskusi bersama. Sedangkan sosialisasi personal adalah sosialisasi dengan pendekatan persuasif dan informas orang per orang. Pendekatan personal ini dapat melibatkan pemerintah desa/kelurahan serta tokoh masyarakat setempat.

2. Melibatkan Pihak Swasta dan Perusahaan

Keterlibatan pihak swasta dan perusahaan setempat melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat membantu mempercepat optimalisasi program nol jamban. Partisipasi sektor swasta dalam program nol jamban dapat berperan sebagai penyedia sarana prasarana jamban sehat, melengkapi keterbatasan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Keterlibatan pihak swasta juga dapat dilakukan dalam pembinaan masyarakat untuk membiasakan pola hidup sehat.

3. Partisipasi Masyarakat

Dibutuhkan peran serta semua pihak terutama partisipasi masyarakat dalam merumuskan keberhasilan Optimalisasi Program ini. Strategi dan langkah untuk memenuhi sarana prasarana yang dibutuhkan merupakan strategi yang bertumpu kepada masyarakat (*community-based strategy*) (Dhokhikah et al., 2007). Tujuannya untuk meningkatkan peran aktif masyarakat di sektor kesehatan sehingga dapat merubah sikap dan keperibadian yang peduli dan bertanggung jawab. Pelibatan masyarakat dimulai dari proses sosialisasi dan pemahaman masyarakat dalam membiasakan pola hidup sehat dengan stop buang air besar sembarangan. Dalam proses pembangunan sarana jamban sehat pemerintah masyarakat juga dapat dilibatkan sebagai tenaga teknis yang membangun sarana tersebut. Hal ini juga dapat mendorong munculnya rasa kepemilikan terhadap sarana yang terbangun. Sehingga masyarakat mau melakukan perawatan sarana yang telah dibangun.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Program Gerakan Nol Jamban di Bantaran Sungai Arut Kecamatan Arut Selatan masih tergolong belum berjalan dengan maksimal. Adapun faktor penghambat implementasi program tersebut yaitu faktor anggaran/dana, serta sumber daya manusia serta keterbatasan sarana dan prasarana. Faktor anggaran

dana yang terbatas dari pemerintah dalam pembangunan tanki septik komunal dan pengadaan tanki septik individual menjadi kendala dalam memenuhi layanan dasar kepada masyarakat sehingga untuk mencapai target sanitasi yang layak dan aman belum optimal. Sarana dan prasarana bantuan tanki septik individual yang diberikan pemerintah bersifat stimulan yang hanya memberikan tanki septik, kloset serta untuk pemasangannya saja sedangkan untuk bilik jamban dibuat oleh warga itu sendiri. Hal ini juga menjadi kendala bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sumber daya manusia yang rendah serta minimnya pendidikan dan kesadaran masyarakat akan hidup bersih dan sehat dengan masih melakukan perilaku BABS di jamban di bantaran Sungai Arut menjadi salah satu penyebab terhambatnya Program Gerakan Nol Jamban ini.

Strategi optimalisasi Gerakan Nol Jamban yaitu pemerintah dan stakeholder inti diharapkan terus melakukan upaya-upaya pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat guna mengubah pola pikir masyarakat. Dalam membantu memenuhi sarana dan prasarana layanan dasar kepada masyarakat pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak swasta dan perusahaan setempat melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Partisipasi masyarakat dapat melalui ikut terlibat dalam pembangunan dan pengelolaannya nanti. Strategi tersebut bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mempercepat layanan dasar kepada masyarakat.

### Ucapan Terima Kasih

Terima kasih penulis sampaikan kepada Dinas PUPR Kota Palangkaraya dan masyarakat di Bantaran Sungai Arut, Kecamatan Arut Selatan yang telah memberikan izin dan informasi data dalam penelitian ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada tim redaksi Jurnal Reksabumi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempublikasikan artikel ini.

### Daftar Pustaka

- Davik, F. I. (2016). Evaluasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pilar Stop BABS di Puskesmas Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 4(2), 107. <https://doi.org/10.20473/jaki.v4i2.2016.107-116>
- Dhokhikah, Y., Dewi, R., & Koesoemawati, J. (2007). Studi Ketersediaan Prasarana Air Bersih Dan Sanitasi Di Permukiman Padat Kota. *Jurnal Purifikasi*, 8(2): 163 - 168. <https://doi.org/https://doi.org/10.12962/j25983806.v8.i2.132>
- Dunggio, N. C. D. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Masyarakat Tentang Penggunaan Jamban Di Desa Modelomo Kecamatan Tilong Kabila Kabupaten Bone Bolango Tahun 2012 Summary Penelitian.
- Indrayati, A. (2012). Manajemen Komunitas Optimum Pada Kelompok Swadaya Masyarakat Bidang Sanitasi Di Kampung Bustaman, Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan

- Semarang Tengah. Forum Ilmu Sosial, 39(1):78–87.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/fis.v39i1.5407>
- Masnarivan, Y., & Arlina, E. (2020). Penyebab Ketidakpemilikan Jamban Sehat. *Jurnal Kesehatan*, 11(2), 121–126. <https://doi.org/10.35730/jk.v11i2.523>
- Noor, M. S., Hidayat, R., Tarlianty, G. N., Ningrum, O. C. (2021). Pemberian Edukasi Stop BABS dan Penggunaan Jamban Sehat Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Pada Masyarakat RT. 003 Desa Pemurus. 1–128.
- Rahmiati, M., Windusari, Y., (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pilar 1 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Desa Terusan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Rahmuniyati, M. E., Sahayati, S., Studi Kesehatan masyarakat Program Sarjana, P., & Respati Yogyakarta, U. (2021). Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Untuk Mengurangi Kasus Stunting Di Puskesmas Wilayah Kabupaten Sleman. 5(1), 80–95.
- Ruba, Y. I., Joko, T., Budiono. (2021). Faktor Pendukung dan Penghambat Program Stop Buang Air. *Jurnal Riset Kesehatan Masyarakat*, 1(2).
- Sari, S. K. (2019). Keberhasilan PKBI Sumatera Barat Dalam Mewujudkan Perilaku Sehat Kolektif Pada Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Suatu Studi Pemberdayaan Komunitas). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 9(1):48-68.  
<https://doi.org/10.15575/jispo.v9i1.4056>
- Surotinojo, I. (2009). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Sanitasi Oleh Masyarakat (SANIMAS) Di Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Gorontalo.  
<https://core.ac.uk/download/pdf/11723097.pdf>
- Syarifuddin, S., Bachri, A. A., & Arifin, S. (2017). Kajian Efektivitas Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Lingkungan Dan Evaluasi Program Di Kabupaten Banjar. 3(1). <http://dx.doi.org/10.20527/jbk.v3i1.4846>
- Widyastutik, O. (2017). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepemilikan Jamban Sehat Di Desa Malikian, Kalimantan Barat. 13(1):1–10.  
<https://doi.org/10.19184/ikesma.v13i1.5223>
- Zakiyya, I. M., Dwimawanti, I. H., Profesor, J., Soedarto, H., Tembalang, S. H., & Kotak, S. (2017). Kajian Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) Di Desa Gemunung Wetan Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2):22-37. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v6i2.15493>
- Zia, N. K., Diamantina, A., & Gading P, S. A. (2019). Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Dalam Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 8(3): 2287-2301.  
<https://doi.org/10.14710/dlj.2019.26002>